

Identitas Perusahaan

Company Identity



Nama Name	PT Utama Karya (Persero)
Tanggal Berdiri Date of Establishment	Pada awalnya merupakan perusahaan swasta bernama Hollandsche Beton Maatschappij yang selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. Peraturan Pemerintah 61/1961 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 1971 menjadi Perusahaan Negara dan berganti nama menjadi Perusahaan Negara Utama Karya. Perusahaan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tanggal 29 Maret 1961. Initially a private company named Hollandsche Beton Maatschappij, which later in accordance with Government Regulation No. Government Regulation 61/1961 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 14 in 1971 became a state-owned company and changed its name to Perusahaan Negara Utama Karya. The Company started its commercial operations on March 29, 1961.
Bidang Usaha Business Activities	Perseroan melakukan usaha di bidang industri konstruksi, pengusahaan jalan tol, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, pengembangan properti, <i>real estate</i>, penyewaan ruangan dan hotel, dan manufaktur. The Company conducts businesses in the field of construction industry, toll road concessions, capacity building services in the field of construction services, property developer, real estate, rent of space and hotel and manufacture.

Dasar Hukum Pendirian

Legal Basis of Establishment

1. Penetapan Pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 1971 menjadi Perusahaan Negara dan berganti nama menjadi Perusahaan Negara Utama Karya.
2. Perubahan Utama Karya menjadi PT Utama Karya (Persero) dengan akta No. 74 tanggal 15 Maret 1973 dari notaris Kartini Muljadi, S.H. yang disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/300/4 tanggal 20 Agustus 1973, serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 54 tanggal 1 Februari 1974, Tambahan No.10.
3. Akta notaris No. 01 tanggal 1 Oktober 2021 dan akta notaris No. 11 tanggal 8 Februari 2022 dari notaris Ashoya Ratam, S.H, M.kn., tentang penambahan modal dari Negara Republik Indonesia. Perubahan ini mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU AH.01.03- 0455708 tanggal 1 Oktober 2021 dan No. AHU-AH.01.03-0088020 tanggal 9 Februari 2022.
4. Akta Notaris No. 07 tanggal 16 Januari 2023 dari notaris Yumna Shabrina, S.H, M.Kn tentang perubahan anggaran dasar. Perubahan ini telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU AH.01.03- 0008478 tanggal 19 Januari 2023
5. Akta Notaris No. 50 tanggal 19 Desember 2023 dari notaris Ashoya Ratam, S.H, M.Kn tentang penambahan modal dari Negara Republik Indonesia. Perubahan ini telah termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 2 Januari 2024 nomor I, Tambahan nomor 43/2024
1. Government stipulation in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 14 of 1971 became a State Company and changed its name to Utama Karya State Company.
2. The change of Utama Karya to PT Utama Karya (Persero) with deed No. 74 dated March 15, 1973 from notary Kartini Muljadi, S.H. which was authorized by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia with Decree No. Y.A.5/300/4 dated August 20, 1973, and announced in the State Gazette No. 54 dated February 1, 1974, Supplement No.10.
3. Notarial deed No. 01 dated October 1, 2021 and notarial deed No. 11 dated February 8, 2022 from notary Ashoya Ratam, S.H, M.kn., concerning additional capital from the Republic of Indonesia. These amendments were approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU AH.01.03- 0455708 dated October 1, 2021 and No. AHU-AH.01.03-0088020 dated February 9, 2022.
4. Notarial Deed No. 07 dated January 16, 2023 from notary Yumna Shabrina, S.H, M.Kn regarding amendments to the articles of association. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU AH.01.03- 0008478 dated January 19, 2023.
5. Notarial Deed No. 50 dated December 19, 2023 from notary Ashoya Ratam, S.H, M.Kn regarding additional capital from the Republic of Indonesia. This amendment has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia dated January 2, 2024 number I, Supplement number 43/2024.

Pemegang Saham

Shareholder

Pemerintah Republik Indonesia dengan persentase kepemilikan saham 100,00%
The Government of the Republic of Indonesia owning 100.00 percent of the shares.

Modal Dasar Authorized Capital	Rp250.000.000.000.000 yang terbagi atas 250.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp1.000.000,- per lembar saham. Rp250,000,000,000,000 divided into 250,000,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 per share.
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and fully paid shares	Rp113.042.000.000.000 yang terbagi atas 113.042.000 saham. Rp113,042,000,000,000 divided into 113,042,000 shares.
Tanggal Pencatatan Obligasi Pertama Kali di Bursa First listing date of the bond on the stock exchange	22 Desember 2016 December 22, 2016.
Nama Bursa Exchange Name	Bursa Efek Indonesia (BEI) Indonesia Stock Exchange (IDX)
Kode Obligasi Bond Ticker	PTHK
Wilayah Operasional Operational Area	Kantor Pusat di Jakarta Head Office in Jakarta
Jumlah Karyawan Total Employees	2.075 orang (per 31 Desember 2023) 2,075 employees (as of December 31, 2023)
Entitas Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi Subsidiaries and Affiliates	Anak Perusahaan – Kepemilikan Langsung Subsidiaries – Direct Ownership • PT HK Realtindo • PT Hakaaston • PT HK Infrastruktur • EPC Energy Singapore, Pte. Ltd. • PT Utama Marga Waskita Kepemilikan Tidak Langsung Indirect Ownership • PT Bhirawa Steel • PT Nusa Pratama Property • PT Petronesia Benimel • PT Semen Indogreen Sentosa • PT Armindo Catur Pratama • PT Cempaka Surya Kencana • Hotel Karya Indonesia • PT Menara Antam Sejahtera
Alamat Address	Kantor Pusat Head Office HK Tower Jl. Letjend. Haryono M.T. Kav. 8, Cawang, Jakarta 13340 Indonesia Telp : 021-8193708 Fax : 021-819 6107 <i>email</i> : pthk@hutamakarya.com <i>Website</i> : www.hutamakarya.com

Riwayat Singkat Brief History

Dimulai dari dinasionalisasikannya "Hollandsche Beton Maatschappij", sebuah perusahaan swasta Hindia Belanda yang banyak mengerjakan proyek konstruksi pada masa pemerintahan Hindia-Belanda di Indonesia. Nasionalisasi tersebut dilakukan pada tahun 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 61.1961 tanggal 29 Maret 1961 sehingga "Hollandsche Beton Maatschappij" resmi berganti nama menjadi PN Utama Karya.

PN Utama Karya telah banyak menghasilkan konstruksi dan bangunan yang dinilai sebagai bangunan yang memiliki nilai sejarah dan monumental seperti Gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta dan Monumen Patung Dirgantara di Pancoran, Jakarta.

Tahun 1970-an menjadi salah satu tahun yang banyak mencatatkan sejarah untuk Utama Karya. Pada 1970 di tengah pengadopsian beton pratekan yang masif di Tanah Air, PN Utama Karya menjadi perusahaan konstruksi yang pertama mengenalkan sistem prategang BBRV dari Swiss. Teknologi Prategang tersebut menghasilkan Jembatan Semanggi sebagai suatu karya yang monumental.

Kemudian pada 1973, tepatnya tanggal 15 Maret PN Utama Karya berubah menjadi PT Utama Karya berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 74 tanggal 15 Maret 1973, juncto Akta Perubahan No.48 tanggal 8 Agustus 1973 yang mana keduanya dibuat di hadapan Notaris Kartini Mulyadi, S.H.

Hutama Karya terus berinovasi dan melakukan diversifikasi usaha dalam menghadapi tantangan bisnis konstruksi yang semakin kompetitif. Utama Karya mengembangkan Unit Bisnis HakaPole, yaitu Pabrik Tiang Penerangan Jalan Umum terbuat dari baja bersegi delapan (Oktagonal) dengan berbagai tipe dan sekaligus melakukan ekspansi usaha ke luar negeri.

Selain itu, Perseroan juga memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi konstruksi yang pesat dengan menghasilkan produk berteknologi tinggi yang memenuhi kualitas, keselamatan kerja dan lingkungan yang berstandar internasional. Hal itu dibuktikan dengan diraihnya sertifikasi ISO 9002:1994, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 dan OHSAS 18001:1999.

Began with the nationalization of "Hollandsche Beton Maatschappij", a private company owned by the Dutch East Indies, which handled many construction projects during the Dutch occupation in Indonesia. The nationalization was carried out in 1961 under the Government Regulation (PP) RI No. 61.1961 dated March 29, 1961, and since then the "Hollandsche Beton Maatschappij" officially changed its name to PN Utama Karya.

PN Utama Karya engaged in many constructions and buildings that are considered historical and monumental, such as the DPR/MPR RI Building in Senayan, Jakarta and the Dirgantara Monument in Pancoran, Jakarta.

The 70s were the decade during which Utama Karya made many historical records. In 1970, in the midst of massive adoption of prepress concrete in the country, PN Utama Karya emerged as the first construction company to introduce the Switzerland's BBRV prestressed system. Semanggi Bridge is a monumental work that used the said technology in its construction.

Later in 1973, on March 15, PN Utama Karya changed its name to Utama Karya, with due observance to the Deed of Limited Liability Company No. 74 dated March 15, 1973, in conjunction with the Deed of Amendment No.48 on August 8, 1973, both of which were made before the Notary Kartini Mulyadi, S.H.

Hutama Karya continues to innovate and diversify its business in the face of increasingly competitive construction business. Utama Karya established the HakaPole Business Unit, a unit that manufacture Public Street Lighting Pole, made of octagonal steel with various types and at the same time expanding its business abroad

In addition, the Company also utilizes the fast development and advancement of construction technology to produce high-tech products that meet international quality, work safety and environment standards. This was proven by the following certificates ISO 9002:1994, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 and OHSAS 18001:1999 certifications.

Seiring dengan semakin menguatnya posisi Perseroan dalam Industri Konstruksi Nasional, Hutama Karya mendirikan beberapa anak perusahaan, yaitu PT HK Infrastruktur, PT Hakaaston, dan PT HK Realtindo dan terus mengembangkan kegiatan usaha baik melalui entitas anak, kerja sama operasi hingga penyertaan saham. Sesuai Peraturan Presiden No. 100 tahun 2014 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden No. 117 tahun 2015, Perusahaan mendapat penugasan untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol di Sumatra sehingga Hutama Karya bertransformasi menjadi perusahaan Konstruksi dan Jalan Tol yang sebelumnya perusahaan Konstruksi.

Pada tahun 2016 Hutama Karya mendapatkan Hak Konsesi Pengusahaan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Ruas (JORR-S) sepanjang 14,25 Km (Lebar 2 x 13,5 m). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. JL.03.04-Mn/1274 tanggal 15 November 2017 dan Amandemen I PPJT Nomor 24 Tanggal 29 November 2017, Perseroan mendapatkan perpanjangan hak Pengusahaan Jalan Tol menjadi 36 tahun yang awalnya 16 tahun 3 bulan.

Sesuai Peraturan Presiden No. 81 tahun 2017 tentang Penugasan kepada Hutama Karya untuk mengusahakan Jalan Tol Ruas Akses Tanjung Priok Seksi W1 dan Seksi W2 dengan hak pengusahaan jalan tol selama 40 tahun. Pada tanggal bulan Mei 2020, Hutama Karya sukses menerbitkan *Global Bond* sebesar USD 600 Juta yang merupakan bagian dari program *Global Medium Term Notes* HK (GMTN) sebesar USD 1,5 Miliar yang terdaftar di Bursa Singapura (SGX) dengan jangka waktu (*maturity*) selama 10 tahun dengan tingkat kupon sebesar 3,75%. Penerbitan *Global Bond* Hutama Karya ini merupakan salah satu penerbitan *Global Bond* tersukses di tengah Pandemi Covid-19 di mana Hutama Karya sebagai *first issuer* mampu mencatatkan *oversubscribed* sebesar 5,8 kali dan menjadi obligasi Indonesia pertama serta satu-satunya yang mendapatkan Jaminan Pemerintah.

Pada tanggal 17 September 2021, Hutama Karya berhasil menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I 2021 masing-masing senilai Rp1 Triliun dan Rp500 Miliar dengan tenor 3 tahun, 5 tahun, dan 7 tahun. Pada penerbitan ini, Perseroan berhasil mencatatkan 3,9x oversubscribed dimana tingkat kupon rata-rata sebesar 9,14% (lebih rendah dari rata-rata *Cost of Fund pinjaman existing* Jasa Konstruksi HK).

In line with the company's stronger position in the National Construction Industry, Hutama Karya established several subsidiaries, namely PT HK Infrastruktur, PT Hakaaston, dan PT HK Realtindo and continued to develop business activities through subsidiaries, joint operations and equity participation. In accordance with Presidential Regulation No. 100 of 2014 as amended by Presidential Regulation No. 117 of 2015, the Company was assigned to carry out toll road concessions in Sumatra so that Hutama Karya transformed into a Construction and Toll Road company which was previously a Construction company.

In 2016 Hutama Karya obtained Concession Rights for the Jakarta Outer Ring Road Toll Road (JORR-S) along 14.25 Km (2 x 13.5 m wide). Based on the Decree of the Minister of Public Works No. JL.03.04- Mn / 1274 dated November 15, 2017 and Amendment I PPJT Number 24 dated November 29, 2017, the Company obtained an extension of Toll Road Concession rights to 36 years, initially 16 years 3 months.

In accordance with Presidential Regulation No. 81 of 2017 concerning the assignment to Hutama Karya to work on the Tanjung Priok Access Section W1 and W2 Section Toll Road with toll road concession rights for 40 years. On May 2020, Hutama Karya successfully issued USD 600 million Global Bond which is part of the HK Global Medium-Term Notes (GMTN) program of USD 1.5 billion which is listed on the Singapore Exchange (SGX) with a maturity of 10 years with a coupon rate of 3.75%. This Hutama Karya Global Bond issuance is one of the most successful Global Bond issues amid the Covid-19 Pandemic where Hutama Karya as the first issuer was able to oversubscribe 5.8 times and became the first and only Indonesian bond to get a Government Guarantee.

On September 17, 2021, Hutama Karya succeeded in issuing ShelfRegistered Bonds II Phase I 2021 and Shelf-Registered Sukuk Mudharabah I Phase I 2021, each with a value of Rp1 Trillion and Rp500 Billion with maturities of 3 years, 5 years, and 7 years. In this issuance, the Company managed to record 3.9x oversubscribed where the average coupon rate was 9.14% (lower than the average Cost of Fund for existing HK Construction Services loans).

Pada awal tahun 2022, Hutama Karya kembali menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 senilai Rp1,00 triliun yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan tenor masing-masing 3 tahun, 5 tahun dan 7 tahun. Dalam penerbitan tersebut, Hutama Karya juga berhasil menyerap dana Rp313,00 miliar dari penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2021. Sukuk ini juga terdiri dari 3 (tiga) seri dengan tenor yang sama dengan penerbitan obligasi konvensional tersebut. Di tahun yang sama, Hutama Karya juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Hutama Karya dipercaya untuk mengerjakan Pembangunan Pelindung Tumbukan Kapal (Fender) dan Bangunan Pelengkap Jembatan Pulau Balang serta Pembangunan Jalan Tol IKN Segmen Karangjoang - KKT Karingau.

At the beginning of 2022, Hutama Karya issued the Hutama Karya Phase II Year 2022 Sustainable Bonds in the amount of Rp1.00 trillion, consisting of 3 (three) series with maturities of 3 years, 5 years and 7 years, respectively. In this issuance, Hutama Karya also managed to absorb Rp313.00 billion from the issuance of Phase II of Hutama Karya's Sustainable Mudharabah I Phase II of 2021. This Sukuk also consists of 3 (three) series having the same tenor as the conventional bond issued. In the same year, Hutama Karya also participated in the construction of The Nusantara Capital City (IKN) which is located in East Kalimantan. Hutama Karya was assigned to work on the construction of fenders and auxiliary buildings for Balang Island Bridge and the construction of Karangjoang - KKT Karingau Segment IKN Toll Road.

Kronologis Perubahan Nama Perusahaan

Chronology of Changes to the Company Name

29 Maret 1961 March 29, 1961	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 61/1961 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 1971, Hollandsche Beton Maatschappij menjadi Perusahaan Negara dan berganti nama menjadi Perusahaan Negara Hutama Karya. In accordance with Government Regulation No. 61/1961, which was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 14 of 1971, Hollandsche Beton Maatschappij became a state-owned company and changed its name to Hutama Karya State Company.
15 Maret 1973 March 15, 1973	Sejalan dengan dipenuhinya persyaratan untuk menjadi Perseroan Terbatas, maka status Hutama Karya berubah menjadi PT Hutama Karya (Persero) dengan akta No. 74 tanggal 15 Maret 1973 dari notaris Kartini Muljadi, S.H. In conjunction with the fulfilment of all necessary requirements to become a limited liability company, the Company's status had changed into PT Hutama Karya (Persero) under the notarial deed No. 74 dated March 15, 1973 of the Kartini Muljadi, S.H.